

BAB I

MEMAKNAI PEMBANGUNAN BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

Pembangunan (*development*) mulai ramai diperbincangkan sejak tahun 1949 pasca Perang Dunia II. Harry S. Truman, Presiden Amerika Serikat (AS) ketika itu mengumumkan kebijakan luar negeri pemerintahannya untuk menghadapi sosialisme, rival utamanya dalam era Perang Dingin. Sebagai alternatif pengganti kolonialisme, pembangunan ditawarkan dalam bentuk program-program pengentasan keterbelakangan dan perbaikan kerusakan pasca perang. Bak bola salju, ide pembangunan terus menggelinding ke seluruh penjuru bumi. Gustavo Gutierrez mencatat evolusi istilah pembangunan kembali mulai bergulir sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) I tahun 1955 di Bandung. KAA disinyalir menjadi momentum awal bangkitnya kesadaran negara selatan-selatan (*underdevelopment*).

Sebagai bungkus baru kapitalisme, pembangunan adalah senjata baru AS menggalang kekuatan dalam tata dunia baru. Runtuhnya Uni Soviet pada dasawarsa akhir milenium ketiga, makin mengokohkan kapitalisme AS

sebagai *super power* dunia. Berbagai strategi terbukti ampuh memuluskan pola marketing pembangunan. Mulai dari transformasi ideologi melalui dunia pendidikan, dukungan struktural melalui PBB, kebijakan pinjaman luar negeri, sampai penguasaan ekonomi dunia. Arusnya tak terbendung lagi. Alhasil, hampir seluruh bangsa mengadopsinya menjadi diskursus dan paradigma utama dalam kebijakan pengelolaan negara. Tak terkecuali Indonesia. Bersama pembangunanlah rezim Orde Baru sukses memikat rakyat selama 32 tahun.

A. Makna Pembangunan

Secara harfiah, "pembangunan" mudah kita maknai sebagai upaya meningkatkan sesuatu ke arah lebih baik. Seiring dengan perjalanan waktu, pembangunan merupakan wacana dinamis. Ia terus menjadi bahan diskusi menarik bahkan hingga kini. Ada dua sudut pandang bagaimana memaknai kata "pembangunan" (Budiman, 2001). Pandangan pertama mendudukan pembangunan sebagai kata benda netral yang menjelaskan proses dan usaha meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, politik, infrastruktur, dan sebagainya. Sedang di lain pihak, pembangunan dipandang sebagai sebuah diskursus, paham, teori, bahkan ideologi tertentu bagian dari perubahan sosial.

Histori dan perspektif sektoral kemudian melengkapi variasi pemaknaan pembangunan secara kontekstual. Ekonom lebih memaknai pembangunan dari sisi pertumbuhan ekonomi (kuantitatif). Seperti Todaro yang mendefinisikan pembangunan sebagai proses multidimensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi dari seluruh sistem sosial dan ekonomi. Ahli sosial selanjutnya

menekankan pembangunan sebagai perubahan akan distribusi barang-barang dalam esensi hubungan sosial. Gutierrez misalnya, memaknai pembangunan sebagai aspirasi rakyat untuk mendapatkan kehidupan manusia yang lebih baik. Geograf berbeda lagi, lebih menekankan pada sisi pengelolaan sumber daya, sebagaimana definisi Martopo yaitu pembangunan sebagai upaya sadar dan berencana untuk meningkatkan mutu hidup, yang dalam pelaksanaannya akan selalu menggunakan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya buatan. Wrihatnolo dan Dwijowiyoto (2006) dalam kacamata manajemen memaknai pembangunan secara sederhana sebagai perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Pembangunan paparnya, bukan sekadar fenomena politik, perubahan sosial, atau pertumbuhan ekonomi, melainkan juga isu manajemen. Pembangunan menurutnya merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian atas pengelolaan dan distribusi sumber-sumber daya produktif nasional untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai isu manajemen, pencapaian kesejahteraan dipengaruhi oleh faktor tujuan pembangunan, motivasi pelaku pembangunan, dan pembiayaan pembangunan.



B. Sekilas Tentang Teori Pembangunan

Kondisi beragam antarnegara menyebabkan arahan yang berbeda pula dalam pelaksanaan pembangunan. Bagi negara sedang berkembang, pembangunan diarahkan pada bagaimana bertahan hidup dan mampu bersaing secara internasional. Sedang bagi negara maju adalah bagaimana melakukan ekspansi dan menguasai dunia. Banyak teori yang ditawarkan serta telah dan sedang dijadikan rujukan implementasi pembangunan. Budiman (2001) merangkum teori-teori pembangunan yang ada menjadi 3 klasifikasi umum, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori pasca ketergantungan. Tiap-tiap bagian didukung oleh beberapa teori.

1. Teori Modernisasi

Teori modernisasi merupakan buah perang dingin. Di bawah payung kapitalisme, ia lahir di medio abad 20 sebagai respons kritis kaum intelektual Amerika Serikat atas implikasi Perang Dunia. Teori ini diyakini menjadi resep bangkitnya negara-negara dunia ketiga menuju modernitas. Penyebarannya cukup revolusioner demi mendapat simpati dunia dan memenangi kompetisi dengan sosialisme. Alhasil, teori ini terbukti mampu menyihir dunia, utamanya negara dunia ketiga, bahkan hingga kini.

Teori ini boleh dikatakan menjadi tonggak kebangkitan kapitalisme global. Sebagai fondasinya, sebelumnya telah hadir beberapa teori kapitalisme, seperti Teori Ekonomi Klasik, Teori Evolusi, dan Teori Fungsionalisme. *Wealth of Nation*, karya fenomenal Adam Smith pada tahun 1776 merupakan pioner teori ekonomi klasik. Beberapa pemikir kemudian masuk seperti David Ricardo, Robert Malthus,

James Mill, dan J. B. Say. Teori ini dibangun dari pilar ekonomi liberalisme. Perekonomian dalam liberalisme dipengaruhi oleh kebebasan individu (*personal liberty*), kepemilikan pribadi (*private property*), inisiatif individu serta usaha swasta (*private enterprise*). Pandangan ekonomi klasik yang memengaruhi teori modernisasi kemudian antara lain:

- a. peran pemerintah hendaknya minimalis, sebaliknya memberikan kebebasan individu (*laissez faire*)
- b. ekonomi akan berkembang jika diletakkan di atas sistem persaingan pasar yang bebas dan sempurna
- c. adanya kepercayaan atas kondisi *full employment*
- d. adanya kepercayaan terhadap kondisi *harmony of interest*, yakni pemenuhan kepentingan individu akan membawa pada pemenuhan kepentingan publik
- e. menitikberatkan pada kegiatan ekonomi, khususnya industri utamanya untuk pertumbuhan ekonomi
- f. ekonomi diyakini berjalan dalam hukum pasar yang universal, yaitu *supply creates its own demand*

Termasuk dalam Teori Ekonomi Klasik adalah Teori Pembagian Kerja (*division of labour*) yang juga dikemukakan Adam Smith. Setiap negara, menurut teori ini harus melakukan spesialisasi produksi sesuai keunggulan komparatif yang dimiliki, sehingga *wealth of nation* akan terwujud. Dalam kondisi ini perdagangan internasional memiliki peran strategis, karena menguntungkan semua negara.

Teori Evolusi atau Teori Organik kemudian lahir pasca revolusi industri Inggris dan revolusi Perancis awal abad ke-19. Awal teori ini berkembang, pemikiran Hegel menjadi dasarnya. Auguste Comte kemudian memopulerkan dengan

dasar berpikir teologisnya. Masyarakat, menurut Comte berkembang melalui tiga fase. Pertama, fase *theological*, yakni fase di mana masyarakat dikuasai 'pendeta' dan diperintah militer. Fase kedua, masyarakat dikuasai pemikiran filosofis, hingga disebut fase *methaphysical*. Terakhir, masyarakat memasuki fase *scientific* atau *positive* atau ilmiah, di mana manusia mulai mempercayai hukum alam dan eksperimen ilmiah. Perkembangan masyarakat, diyakini akan berproses secara linear dari kondisi primitif menuju modern dalam jangka panjang. Rekayasa manusia (*social engineering*) memegang peranan signifikan dalam menentukan fase evolutif tersebut.

Sebagai kritik atas Teori Evolusi, Teori Fungsionalisme atau Struktural muncul pada tahun 1930-an. Pencetusnya adalah Robert Merton dan Talcott Parsons. Masyarakat, dalam pandangan teori ini terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan. Stabilitas dan pertumbuhan masyarakat bagi Parsons akan terwujud melalui mekanisme fungsional antarbagian masyarakat tersebut. Perubahan masyarakat dengan demikian akan terjadi secara dinamis dan harmonis oleh semua bagiannya. Tidak dikenal waktu evolusi dalam teori ini.

Mendapat banyak pengaruh dari teori-teori di atas, Teori Modernisasi kemudian berkembang pesat. Teori Modernisasi menggunakan dikotomi "modern" dan "tradisional". Modern adalah simbol kemajuan, pemikiran rasional, dan cara kerja efisien, yaitu diwakili negara industri maju. Tradisional dicirikan kondisi belum maju, irasional, dan tidak efisien, dalam hal ini menggambarkan negara miskin dan berkembang.

Hukum-hukum dalam Teori Modernisasi berlaku secara universal, tanpa memerhatikan faktor waktu ataupun faktor tempat (*a-historis*). Konteks masyarakat dan perkembangannya di sepanjang sejarah kurang mendapat perhatian. Masyarakat bergerak secara garis lurus atau *inlinear*, dari sesuatu yang irasional menjadi rasional. Misalnya, dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pembangunan menurut teori ini harus dicari di dalam negara-negara yang bersangkutan, bukan di luarnya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor internal negara-negara yang bersangkutan.

Modernisasi atau yang kemudian dikenal juga dengan pembangunan didukung oleh beberapa teori. Berikut adalah peta pendukung Teori Modernisasi:

a. Teori Harrod-Domar

Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi, tidak mempersoalkan manusia. Manusia dianggap sebagai sumber daya yang secara alamiah sudah tersedia, sehingga tidak memengaruhi pertumbuhan.

b. Teori Max Weber

Menurut Max Weber, kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat terbentuk oleh peran agama yang membentuk manusia. Teori ini kemudian dikenal dengan Teori Etika Protestan. Etika Protestan mengajarkan bahwa takdir tiap manusia sebenarnya sudah ada, tetapi tidak langsung bisa diketahui. Salah satu cara yang diyakini bisa mendapatkan kejelasan nasib adalah